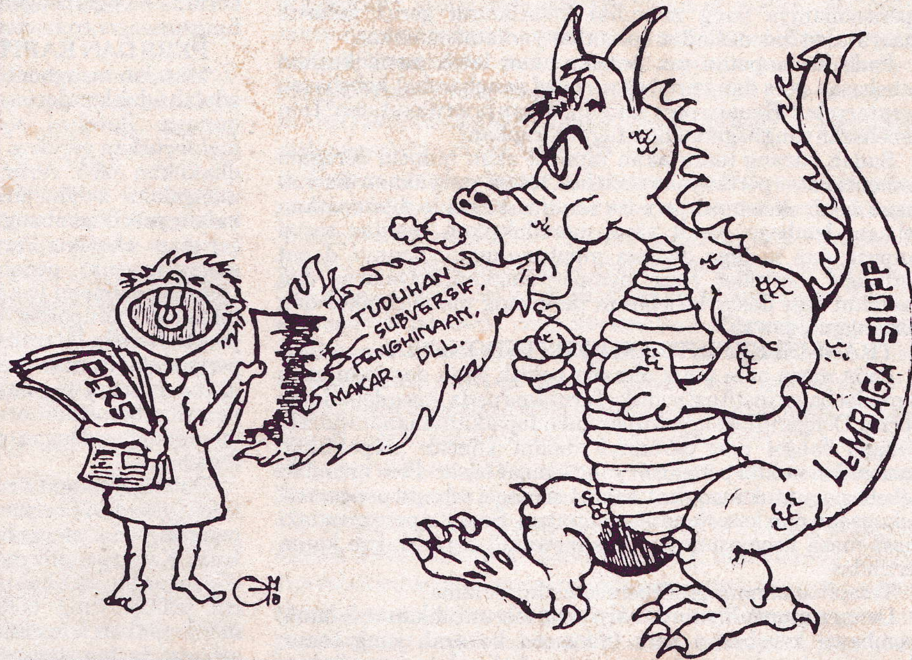
AMIGOZ

BERKARYA DALAM CINTA DAN PERSAUDARAAN

Keluarga Mahasiswa Katolik Santo Aloysius Gonzaga
Universitas Airlangga

EDISI INI



AMIGOZ
RISALAH DIRI
PERCIKAN HATI
Penasehat
Rm. Anton Kedang SVD
Pelindung
Ketua Keluarga Mahasiswa Katolik St. Aloysius Gonzaga Unair Surabaya
Pemimpin Umum
Petrus Bimo A.
Pemimpin Redaksi
FX Wawan Probo S.
Dewan Redaksi
Yustinus Santos, Albertus Caesar, Josua Viktor, Agustinus Kakasusila, Eusebius Purwadi, Lucia Pudyastuti R, Philipus Y.A. Perdana
Sirkulasi & Pemasaran
FX Eko Kristanto, Yudha Wardhani
Keuangan
Khatarina Dwi A.
Alamat Redaksi
Jl. Jojoran I/50 Surabaya 60285
telp. (031)5936075
Redaksi menerima sumbangan naskah berupa tulisan tangan, ketikan, ataupun dalam disket. Isinya opini, humor, anekdot, kritik, atau apapun boleh.
Diterbitkan oleh
Keluarga Mahasiswa Katolik Santo Aloysius Gonzaga Universitas Airlangga
UNTUK KALANGAN SENDIRI

Editorial

50 Tahun Kemerdekaan = Pemborosan ?

Gaung 50 tahun kemerdekaan sudah begitu keras terdengar, walaupun gongnya sendiri belum ditabuh. Kapal-kapal layar dari berbagai negara sudah mulai berdatangan di pelabuhan Benoa Bali. Mereka akan mengikuti pawai akbar kapal-kapal layar dari Benoa Bali sa mpai Tanjung Priok Jakarta, Hajat besar yang diberi label Arung Samudra'95 ini merupakan salah satu dari rangkaian hajat besar peringatan 50 tahun Indonesia Emas. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang berorientasi sama yang dilakukan mulai dari kampung-kampung, RT/RW sampai pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional maupun internasional.

50 tahun kemerdekaan juga disemarakkan oleh hadirnya kelap-kelip penjor-penjor lampu. Penjor-penjor lampu yang dipasang didepan setiap rumah sepanjang jalan mulai dari jalan-jalan utama sampai kedalam gang-gang kecil seolah merupakan gerbang panjang yang mengucapkan selamat datang apabila kita memasukinya. Persaingandalam hal pemasangan penjor-penjor lampu sangat kentara sekali terlihat antar warga maupun antar instansi, bahkan ada salah satu instansi milik pemerintah yang menaburi seluruh gedungnya dengan kelap-kelip lampu hias mulai dari atap gedung sampai ketembok-temboknya. Pemasangan penjor lampu yang merupakan himbauan dari salah seorang pejabat, membawa berkah tersendiri bagi para pedagang lampu hias. Setidaknya dengan adanya himbauan tersebut membuat oplah pejualan lampu hias semakin meningkat bila dibanding hari-hari biasa.

Dibalik suasana yang begitu gebyar dengan berbagai macam kegiatandan kelap-kelip lampu penjor, sebenarnya masih banyak hal lain yang patut untuk kita renungkan dalam menyambut Indonesia Emas. Tidak hanya sekedar *show of force* dari angkatan laut atau kebanggaan semu atas kelap-kelip lampu yang seolah bisa menghilangan rasa lapar. Perlu kiranya dikaji lebih dalam lagi, apakah peringatan kemerdekaan harus selalu identik dengan gebyar. Tidakkah sejenak kita perlu menengok kondisi riil masyarakat kita, dimana utang luar negri begitu membengkak (DSR : Debt Service Ratio kita sudah membengkak menjadi 33%, Didik J. Rachbini dalam bukunya Pembangunan yang Dibimbing Utang) dan kondisi masyarakat kita yang hidup dibawah garis kemiskinan masih begitu besar (27 juta penduduk, data BPS). Suatu kontradiksi muncul, ketika iklan layanan masyarakat yang sering muncul dilayar televisi begitu gencar menganjurkan program hemat energi disisi lain ada saja pejabat yang mencangkan "gebyarisasi penjor". Bila dihitung-hitung berapa juta watt yang harus dikeluarkan PLN tiap malam untuk mendukung penjorisasi itu dan apabila dihitung dengan dana berapa milyar yang dihamburkan untuk program yang mubazir itu. Ironi memang, perayaan 50 tahun kemerdekaan harus dinodai oleh sikap-sikap boros dan konsumerisme yang cukup tinggi.

Alangkah lebih baik apabila perayaan 50 tahun kemerdekaan itu dihindarkan dari hal-hal yang berbau glamour, pemborosan dan konsumerisme. Akan lebih bermanfaat dan lebih berguna bila sumberdaya yang ada dipakai untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Redaksi

Sorot

Pers Indonesia Itu...

Tahun ini merupakan tahun yang memiliki makna khusus bagi Indonesia, karena akan merayakan limapuluh tahun Indonesia merdeka. Dalam usia setengah abad in, kita tentu berharap universalisasi kebebasan yang didasari oleh kedilan dan demokratisasi yang semakin berkembang. Dimana kebebasan tersebut didasarkan atas harkat kemanusiaannya, dan bukan karena masyarakat atau negara yang memberikannya. Jadi, kebebasan yang realitas pro positip yang mendorong kita untuk mendobrak nilai-nilai yang sungguh-sungguh menjadikan masyarakat menjadi tumbal. Hal-hal yang menyangkut kebebasan ini perlu disadari, dan harus menjiwai operasionalnya yang memiliki keterikatan gerak seluruh masyarakat Indonesia dan bukan hanya diatasnamakan.

Pada kesempatan ini, penulis akan lebih memfokuskan kebebasan pers dan variabel-variabel penghambat kebebasan pers tersebut. Kenapa pers yang dijadikan prioritas utama? Dan kebebasan yang bagaimana yang diharapkan?

Sudah barang tentu akan muncul akan muncul beragam komentar atas pertanyaan tersebut, tetapi yang akann disoroti disini ialah eksistensi pers itu sendiri. Yakni ia ditempatkan sebagai lembaga sosial yang merefleksikan realitas sosial empirik dan ia juga dengan muatan-muatan ionnya dapat berfungsi controller yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang mandiri, aktif dan bertanggungjawab.

TRANSISI EKSISTENSI PERS INDONESIA

Pada masa orde lama dimana politik lebih dominan, pers tampil sebagai institusi politik. Terutama pada masa demokrasi liberal. Dengan fungsinya itu pers mendapatkan amanat sejarah, dimana fungsi dan perannya dalam kancah perpolitikan nasional memiliki pengaruh yang sangat besar. Pers memiliki kebebasan untuk mengkritik dan berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Saat itu pers mendaki masa-masa keemasannya, pers mewakili kepentingan kaum tertindas.

Tetapi bagaimana profil pers setelah orde lama?

Dengan munculnya orde baru yang meruntuhkan orde lama, membawa kebebasan pers Indonesia ke arah yang semu. Penguasa atau rezim orde baru, mengubah haluan perpolitikan nasional yang lebih mangarah ke ekonomi sebagai panglima. Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. "Kestabilan Politik" menjadi target utama rezim orde baru. Dengan target yang demikian, gerakan-gerakan yang bisa menghimpun kekuatan atau basis, khususnya pers umum dan pers mahasiswa, dibumihanguskan. Koran-koran dan majalah-majalah dibreidel tanpa proses hukum dan tanpa batas waktu yang jelas. Disamping pembreidelan, dilakukan penangkapan-penangkapan terhadap wartawan karena mengganggu gugat dinasti orde baru.Pemberangusan pers ini, menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan elit birokrasi di negeri yang kita cintai ini. Juga menunjukkan bahwa dinasti orde baru, ***TERTUTUP TERHADAP KRITIK***. Penghentian gerakan pers oleh rezim orde baru ini jelas memunculkan trauma, dan mempengaruhi sepak terjang pers Indonesia pada masa sekarang ini.

PERS DAN KEKUASAAN

Dalam format politik otoriterisme birokratik, digambarkan bahwa kekuasaan itu didominasi oleh militer, massa didemobilasasikan, dan untuk mengendalikan gerakan oposisi, penguasa melakukan tindakan represif. Atau dengan kata lain bisa diartikan, bahwa konsep negara tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan penguasa pada saat itu. Dan masyarakat dianggap berdaulat penuh terhadap negara apabila masyarakat mengamini atau mematuhi setiap sabda penguasa, masyarakat hanya menunggu untuk diperintah saja.Kondisi yang menunjukkan dominannya kekuatan negara ini meng akibatkan munculnya birokrat-birokrat tangan besi yang bebas mematikan ide-ide dan pemikiran yang dianggap menghambat kelanggengan kekuasaanya. Maka pada saat negara (elit) memasuki pers, reaksi daari pers Indonesia memiliki kecenderungan untuk memasuki negara. Terjadilah dikotomi negara dengan pers, yang berekses negatip, mandulnya pers Indonesia.

Elit politik dengan bargaining position dan bargaining powernya, menciptakan wadah wartawan Indonesia, mengendalikan arus informasi dengan menciptakan badan-badan sensor. Tujuannya adalah untuk mempertahankan status kedudukan dan kekuasaan yang sudah diperoleh dengan menyensor kritik-kritik dari pers yang mewakili suara masyarakat. Akhirnya, kemandirian pers sangat ditentukan oleh unsur-unsur hegemoni kekuasaan. Terciptalah pemasungan intelektual, pemasungan idealisme....Pada saat pers berusaha untuk membongkar pasung yang melekat di tubuhnya, malapetakalah yang akan terjadi. Pembredelan dan penangkapan! Dan itu semua terjadi pada masa dinasti orde baru!

Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, kepada siapakah seharusnya pers Indonesia Bertanggungjawab? Kepada penguasakah atau kepada masyarakat?Bila pers bertanggungjawab kepada penguasa, ini berarti sistem politik negara kita adalah otoritarian...Apa iya? Tetapi sesuai dengan eksistensi awalnya, pers harus bertanggungjawab kepada masyarakat pembacanya. Dengan penerapan eksistensi pers ini, bisa mendidik masyarakat menjadi pembaca kritis. Bila terjadi kesalahan dalam pemberitaan pers, masyarakat bisa mengkritisinya secara proporsional. Akhirnya masyarakat pembaca berfunsi sebagai pengontrol kebenaran liputan pers, dan pers berfungsi mengontrol sistem kekuasaan yang ada?

PERS DAN KAPITALISME

Masalah menghentikan gerakan massa atau gerakan pers, adalah tidak lain dari soal menukar satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Revolusi sosial dapat dihentikan dengan cara meluncurkan gerakan ekonomi. Variabel-variabel inilah yang dilakukan oleh rezim orde baru. Rezim orde lama yang mengalami kehancuran ekonomi karena lebih berfokus ke bidang politik tumbang oleh rezim orde baru yang memfokuskan gerakan ekonomi.Perubahan penekanan tersebut sangat mempengaruhi penampilan atau warna pers Indonesia. Gerakan ekonomi yang kapitalis, yang mengagung-agungkan teknologi merupakan faktor pendukung pergeseran eksistensi pers Indonesia. Interaksi antara faktor tersebut, mengakibatkan pers menjadi terkait dengan bisnis. Terciptanya pers industrialis di Indonesia. Yang dalam prakteknya, lahirlah konglomerasi pers yang berusaha untuk mengejar total revenue yang tinggi bila dibandingkan dengan total cost yang dikeluarkan oleh bisnis pers tersebut.

Dalam pers kapitalis ini, secara struktural bidang redaksional tidak lepas dari campur tangan pemilik modal. Sadar atau tidak pemilik modal menjadi penentu informasi yang akan diterbitkaan. Kaum pemilik modal, dengan melihat sistem politik yang ada sekarang ini, akan menghindari liputan-liputan tentang isu-isu politik yang bersifat vulgar, sehingga lebih banyak menampilkan komersialisasi berita. Pemilik modal berfungsi sebagai badan sensor. Tegasnya, anggota komersial atau wartawan pers tidak memiliki kebebasan. Pers akhirnya tidak kreatif, lebih profit oriented dengan menampilkan iklan-iklan terselubung.

Disamping itu juga, banyaknya pengusaha yang memiliki hubungan nepotisme dengan penguasa, penguasa memiliki saham di perusahaan pengusaha tersebut. Hal ini mengakibatkan liputan pers menjadi variabel terikat dengan kepentingan pengusaha dan penguasa.

Keadaan-keadaan ini mengakibatkan pertentangan antara harapan dan kenyataan. Harapan kita adalah berfungsinya pers yang secara psikologis dinilai memiliki potensi konflik atau potensi pengontrol yang agresif.Sayang, sungguh amat disayangkan, harapan ini masih mimpi.... Belum menjadi kenyataan!!

PENUTUP

Bila kita merefleksikan kembali sejarah pergerakan pers di Indonesia, terutama pada masa kolonial, dimana pers menyatu dengan pergerakan nasional yang mengadakan perlawanan terhadap penindasan hak-hak asasi manusia. Namun, kolonial pada masa itu tidak tinggal diam, kolonial mengancam siapapun yang mengadakan permusuhan dan perlawanan atau penghinaan terhadap kolonial. Akibatnya tidak sedikit bumi putera yang ditangkap, dan pembreidelan pers berlangsung tanpa hentinya.

Dengan melihat perspektif sejarah tersebut, dan kita bandingkan dengan keadaan sekarang, perbedaan atau persamaanya terletak dimana? Lebih kolonial yang mana?Untuk itu marilah kita segenap bangsa Indonesia merenungkan kembali, yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini sebenarnya apa? Apakah seperti keadaan yang sekarang ini? Sekali lagi, kita sudah limapuluh tahun merdeka. Dan selama limapuluh tahun ini, apakah kemerdekaan itu sudah kita rasakan?

Dan apakah , tahun-tahun ke depan tetap saja tidak tercipta suatu keadaan yang kita harapkan, dimana pers itu kembali ke eksistensinya semula. Yakni pers ditempatkan sebagai lembaga sosial yang merefleksikan realitas sosial empirik dan juga pers dengan muatan-muatan ionnya dapat berfungsi sebagai controller terhadap sistem kekuasaan yang ada, dan menciptakan pers yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers aktif, bertanggungjawab dan mandiri.

JANGAN BIARKAN GORESAN INTELEKTUALMU TERPASUNG!MERDEKA...

Goenawan Napitoe
IESP'92, UA

KOBARKAN PERS PERJUANGAN

Opini

Sejalan dengan kemajuan informasi, peranan pers semakin menonjol dalam segala aspek kehidupan. Disadari begitu vital posisi pers dalam masyarakat maka tak sedikit orang beradu kepentingan dan memanifestasikan aspirasi lewat pers. Tak heran jika perjalanan pers kita mempunyai beberapa warna.

Pers Perlawanan

Di era penjajahan warna pers kita didominasi warna perlawanan terhadap penjajahan, yang jelas-jelas menindas hak asasi manusia. Penyadaran kritis akan pentingnya kemerdekaan yang harus direbut dan bukanlah *'Taken for granted'*. Pers di era itu menyatu dengan pergerakan nasional, sehingga bukanlah suatu kebetulan para pemimpin penerbitan saat itu berasal dari pemimpin-pemimpin pergerakan; Ir. Soekarno pernah tercatat sebagai pimpinan redaksi majalah Pikiran Rakjat, M. Hatta penulis tetap majalah Daulat Rakjat, koran Panji dan Pedoman Masyarakat, H. Agus Salim pemimpin redaksi Mestika, Sam Ratulangi menerbitkan Nationale Comentaren dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lagi yang menerbitkan pers perlawanan.

Dalam memperjuangkan aspirasinya para tokoh pergerakan memerlukan pengorbanan yang tidak kecil, bahu membahu mengumpulkan sen demi sen untuk biaya produksi, yang tentu saja tidak ada pemasukan dari iklan. Penguasa kolonialpun tidak tinggal diam, produk hukum kolonial diterapkan. Sejak 1918 dimunculkan pasal-pasal ***'Haatzaai Artikelen'*** yang intinya mengancam siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap pemerintah di Hindia Belanda. Soewardi Soeryaningrat, penanggung jawab Mingguan Persatoean Hindia terkena pasal ini dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.

Tekanan maupun ancaman penjajah Belanda tidaklah membuat para tokoh pergerakan surut, sebaliknya ketika para pemimpin pergerakan mendapat perlakuan represif dan berkali-kali keluar masuk tahanan malah membuat aktifitas pers perjuangan lebih berkobar. Satu dibredel muncul koran yang lebih tajam dan lebih berani. Peran penyadaran kehidupan berbangsa dengan misi persatuan terus diemban. Pers perjuangan terus dikibarkan, kalau tidak bisa beredar secara resmi mereka mengedarkan secara diam-diam sebagai *'Underground paper'* (pers bawah tanah). Sehingga tidak dapat dipungkiri peran pers perjuangan ikut serta andil dalam kemerdekaan yang selama itu didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Belenggu Bisnis dan Hegemoni Negara

Sejarah pers perjuangan merebut kemerdekaan dari belenggu penjajahan sudah berlalu. Perjalanan pers di alam kemerdekaan sudah cukup usia, lima puluh tahun bukanlah usia anak-anak lagi. Pembangunan di segala bidang dan majunya era informasi menghadapkan posisi pers kita terjerat dalam dua belenggu yaitu belenggu kepentingan bisnis dan sarana efektif perpanjangan tangan hegemoni negara. Dua belenggu itu semakin erat terkunci manakala negara memberlakukan SIUPP.

Praktek bisnis di alam kapitalis adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan baik yang *'pure bisnis'* maupun bisnis siluman. Dalam dunia pers *'pure bisnis'* adalah istilah yang kami pakai untuk mengatakan suatu cara fair play dalam memainkan dan mengelola penerbitan sehingga mendapat keuntungan sesuai dengan haknya. Dengan cara ini, para pengelola penerbitan harus jeli membidik berita yang pas bagi sasaran pembaca. Mingguan Monitor pernah beroplah tinggi dengan menampilkan sekwilda (sekitar wilayah dada dan paha), belum lagi koran gosip seperti Pos Kota mempunyai pembaca yang tidak sedikit di Jakarta. Ketika putaran Piala Dunia dimana masyarakat dilanda Bola Mania, banyak koran membuat rubrik khusus yang memakan halaman demi halaman. Upaya untuk menambah jumlah pembaca ditingkatkan tidak saja dengan menyesuaikan selera pasar, namun juga strategi pemasaran digalakkan mulai pemasangan iklan di media elektronik sampai mensponsori event-event penting. Jelas dengan banyaknya pembaca, pemasukan iklanpun bertambah dahsyat otomatis rupiah yang mengalir semakin besar. pada umumnya modus operandi diatas secara konvensional banyak diterapkan oleh penerbitan di era kapitalis ini.

Namun masih ada juga kalangan yang tega menggunakan praktek bisnis siluman, yaitu suatu praktek bisnis dengan menggunakan cara kotor. Hal tersebut tidak dapat dielakkan karena oknum tersebut erat kaitannya dengan kekuasaan. Seperti penyelidikan yang dilakukan tim investigasi Aliansi Jurnalistik Indonesia yang menerbitkan ***'Forum Wartawan Independen'*** terdapat suatu kenyataan bahwa Harmoko selama memegang tiga periode jabatan Menpen mengambil saham tidak kurang dari tigapuluh media. Ada untaian benang merah antara pembredelan dan penerbitan SIUPP baru. Ada semacam isyarat halus untuk mengikut sertakan keluarga Harmoko sebagai pemilik saham, tanpa itu jangan harap SIUPP akan keluar. Yang lebih gila lagi tak jarang sebagian saham tersebut adalah saham kosong, maksudnya saham diperoleh keluarga Harmoko tanpa menyetor uang sama sekali. Dengan cara seperti itu bisnis Harmoko di dunia pers maju pesat bahkan dengan operasi silumannya Harmoko jelas lebih piawai dibandingkan Rupert Murdoch si Raksasa pers (lihat Independen no 10/1995).

Meski di Indonesia terdapat peraturan PP No 30 tahun 1980 pasal 3; melarang pegawai negeri untuk memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, atau menjabat sebagai direksi, pimpinan maupun komisaris dari *'perusahaan swasta'*. Namun toh dengan kekuasaan yang mereka pegang banyak pejabat yang mengesampingkan peraturan tersebut. Bak pedang bermata dua, satu sisi merupakan bisnis yang melimpah ruah di sisi lain merupakan alat legitimasi kekuasaan yang efektif, untuk kepentingan politis.

Dalam sisi kepentingan politis pers adalah alat efektif yang digunakan sebagai media hegemoni. Hegemoni adalah suatu istilah filsafat, yang banyak dilontarkan oleh tokoh-tokoh mazhab sekolah Frankfurt. Hegemoni dapat disederhanakan sebagai suatu usaha penataan pola pikir yang merambah pada ambang kesadaran kognisi yang secara halus menolak aspek kritis kognisi. (note; mazhab Frankfurt, yang menganut teori kritis menekankan aspek pembongkaran kognisi/dekonstruksi sebagai contra hegemoni, yang antara lain dipelopori oleh ***Antonio Gramsci***). Hegemoni sangat efektif lewat media massa karena selain banyak dibaca orang, menurut Mc Luhan bahwa media massa sebagai perluasan manusia *(the extension of man)*, yang meliputi baik aspek psikis maupun fisik yakni seluruh indera dan organ manusia. Dengan hegemoni penguasa mengharapkan keseragaman pola pikir yang pada akhirnya menguasai kekuasaan atas pendapat. Kiranya dapat dipahami dengan pers yang terhegemoni pembenaran atas tindakan penguasa selalu mendapat sumonggo dawuh oleh rakyat yang terhegemoni.

Bisa dipahami dengan kondisi diatas sulit pers ber-SIUPP melontarkan idealisasi perjuangan, karena kedua belenggu telah mencokol demikian erat dalam pers kita.

Setitik Harapan Pemunculan Pers Gerilya

Kondisi diatas bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi

lihat halaman 4...

Refleksi

Hanya Utopia (?)

Dalam film-film buatan Amerika, bila seorang wartawan mendesak seorang sumber resmi untuk berbicara, biasanya dia akan menggunakan argumen, "The public have the right to know." Ini, menurut saya, menggambarkan tugas utama pers yaitu menyuplai masyarakat dengan informasi yang valid, dengan kebenaran. Yang dengan informasi-informasi tersebut, masyarakat bisa memperbaiki diri, melihat dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada, dan pada tahap selanjutnya mengembangkan diri menjadi masyarakat yang lebih maju. Ini, tentu saja sebuah gambaran ideal yang hampir (semoga saja tidak) menjadi sebuah utopia. Yang terjadi sekarang ini justru lebih dekat dengan kisah berikut ini :

Ada seseorang terjatuh dari sepedanya dan lututnya terluka. Cukup lebar memang lukanya. Karena takut akan rasa sakit yang timbul bila luka itu dibersihkan dan diobati, ia menutup begitu saja luka itu, sampai berhari-hari. Banyak orang yang ingin membantunya mengobati luka itu, tapi semua ditolaknya dengan kata-kata, "Ini hanya luka kecil, tak ada artinya." Semakin lama, semakin kasarlah penolakannya. Pada akhirnya, dokter terpaksa mengamputasi kakinya karena infeksi yang parah. Sesaat sebelum operasi dimulai ia tertawa kecil, sambil bergumam penuh ironi, "Hanya sebuah luka kecil......"

Tentu, ini hanya sebuah rekaan, tapi kisah ini bisa memberikan sepotong gambaran tentang situasi negara kita saat ini. Luka-luka tersebut adalah berbagai persoalan yang tengah dihadapi negeri ini macam korupsi, nepotisme, kolusi. Pembredelan Tempo, Detik, dan Editor bisa kita analogikan dengan penolakan terhadap orang-orang yang ingin membantu mengobati luka tersebut. Padahal luka tersebut bila hanya ditutupi saja akan semakin parah bukan lagi dalam hitungan hari tapi sudah dalam hitungan detik.

Menjadi pengontrol kekuasaan memang bukan hal yang mudah, karena penguasa, bagaimanapun juga sistem politiknya, selalu merasa dirinya benar karena sebagai pengambil keputusan tak boleh ada sedetikpun terbuang untuk keraguan. Machiavelli bahkan berkata, "Singkirkan setiap penentang!" Tapi penguasa bukanlah Tuhan, yang tak bisa salah, yang tak bisa lelah. Penguasa adalah manusia, lengkap dengan kelemahan dan keterbatasannya. Justru di sinilah pers berperan besar. Sebagai pengungkap kebenaran, pers berfungsi sebagai pengingat para penguasa akan keterbatasan mereka. Memang, ada batasan moral bagi pers dalam mengungkapkan suatu informasi, antara lain tingkat kematangan masyarakat dan budaya setempat. Tetapi bila batasan semacam itu lantas dipakai untuk membungkam kebenaran, jelas sudah berlebihan. Setiap kali ada suara yang mengingatkan bahwa ada luka yang belum diobati, tanggapan yang muncul selalu, *"Ini bukan cara kita.."*, *"Budaya kita harus mengharuskan menjunjung tinggi yang lebih tua.."* atau malah, "*..mereka itu orang irrasional, gila!*" seperti kata-kata Presiden Soeharto setelah peristiwa Dresden.

Tapi tantangan pers Indonesia bukan hanya itu. Karena insan pers juga manusia, maka persoalan macam suap, berita pesanan, salah muat bermunculan. Memang sulit untuk mempertahankan idealisme bila keluarga di rumah meringis menahan lapar. Maka bisa dimengerti mengapa sebagian eks wartawan Tempo menjual dirinya ke Gatra sementara kawan - kawannya yang lain sedang berjuang mendirikan Tempo kembali. Suara Independen edisi Juni 1995 bahkan mengungkapkan tingginya tingkat kesalahan pemuatan berita dalam pers Indonesia yang, antara lain, disebabkan kurangnya profesionalisme para pekerja pers. Ini harus disadari oleh insan pers Indonesia, sebab sebelum mengobati luka orang lain jelas luka sendiri harus diobati.

Memang kebenaran itu pahit, memang kebenaran itu mahal. Anthony de Mello bahkan berpendapat kebenaran sejati hanya bisa dibayar dengan ketidaktenangan seumur hidup. Tapi kalau kebenaran itu tidak diungkapkan, maka kita akan menjadi orang yang ikut bersalah karena kita tidak berbuat. Bukankah dalam kasus Marsinah, Mutiari mendapat vonis bersalah dari PN Sidoarjo karena *'mengetahui suatu rencana kejahatan dan tidak melaporkannya'*? Dan siapa lagi yang bisa secara efektif bisa mengungkapkan kebenaran selain pers ? Jadi, jangan biarkan *'pers sang pengungkap kebenaran'* tetap berada di dataran utopia. Tarik dia ke bumi Indonesia, agar jangan sampai luka-luka itu membusuk karena ditutup-tutupi.



Philipus Y.A. Perdana
Hubungan Internasional '93 / FISIP UNAIR

...dari halaman 3

perkembangan pers kita. Ada upaya-upaya melawan tirani atas pers, baik secara hukum; Surya Paloh pernah mengajukan Judicial Review atas peraturan pembatalan SIUPP ke Mahkamah Agung, selain itu mantan Pemimpin Umum Harian Prioritas ini pernah mengajukan surat terbuka kepada MPR yang isinya pertama; meminta agar MPR periode 1992-1997 menetapkan GBHN yang menjamin dan memberikan penegasan khusus mengenai kebebasan pers, yang bebas dari belenggu pembatalan SIUPP, kedua; agar dalam SU MPR 1993, MPR mencabut atau membatalkan demi hukum Permenpen No 01/1984 yang mengatur tentang SIUPP. Meskipun Judicial Review-nya ditolak namun upaya perlawanan yang dilakukan Surya Paloh tetap didukung banyak kalangan. Lain lagi yang dilakukan Gunawan Moehamad, mantan pimred Majalah Tempo ini memilih jalur PTUN, menggugat Menpen Harmoko atas dicabutnya SIUPP Majalah Tempo. Ternyata Hakim PTUN Mangkudilaga memenangkan gugatan Tempo dan Harmoko mengajukan banding.

Selain lewat jalur hukum, banyak pula perlawanan yang dilakukan masyarakat menentang dibredelnya Tempo, Editor dan Detik. Puluhan pernyataan keprihatinan muncul, aksi solidaritas merebak tidak saja di DKI namun juga di kota-kota lain mulai mimbar bebas maupun mogok makan juga pemboikotan pers haram.

Perlawanan pada PWI pun muncul yaitu dengan ditandatangani deklarasi Sinargalih yang melahirkan wadah baru yaitu 'Aliansi Jurnalistik Independen' yang menginginkan pers yang merdeka dan berdaulat. Tumbuhlah era pers gerilya, yaitu pers tanpa SIUPP yang beredar dari tangan ke tangan. AJI menerbitkan FOWI Independen, beberapa LSM mempunyai penerbitan alternatif. Jelas dalam penerbitan alternatif tersebut mengetengahkan berita-berita tajam, yang jelas pers ber-SIUPP pasti tidak berani memuatnya. Analisanya tajam disertai data akurat yang menghadapkan pembacanya lebih obyektif melihat suatu permasalahan. Jelas hegemoni negara tak bisa menjangkau pers model gerilya ini, sehingga konscientisasi kesadaran kritis pemberdayaan masyarakat adalah misi utama pers ini.

Namun penguasapun tak tinggal diam, lewat senjata dan militer pers alternatif ini dilumpuhkan. Kantor redaksi berita dari PIJAR diobrak abrik dan beberapa pengasuhnya ditangkap. Tiga tokoh AJI pun tak luput dari penangkapan, FOWI Independen dilarang terbit. Sebagaimana layaknya gerilyawan, mati satu tumbuh seribu, FOWI Independen dibinasakan dan sekarang muncul SUARA INDEPENDEN.

Ternyata di alam yang katanya sudah lima puluh tahun merdeka masih banyak upaya represif menekan pers. Banyak kebohongan-kebohongan dilontarkan penguasa lewat pers. Namun di sisi lain masyarakat juga haus pers yang kritis dan berani. Ada semacam gugatan bisakah pers mahasiswa bahu membahu memunculkan pers alternatif, turut serta bergerilya merobek belenggu bisnis dan hegemoni guna memunculkan kesadaran kritis untuk berani menebus amanat hati nurani rakyat yang telah diperdaya sekian lama? Kobarkan pers perjuangan ... **MERDEKA.**

Yus Santos(forum Jojoran)

SDM DALAM PERSPEKTIF ORMAS MAHASISWA

Opini

Sebuah Pengamatan

Meskipun cukup kadaluarsa dan semua orang sudah membicarakan, pembahasan sumber daya manusia — selanjutnya SDM — tetap aktual dan menarik. Daya tarik SDM tidak saja merupakan primadona atau titik tekan pembangunan dewasa ini, setelah sumber daya alam semakin menipis dan kritis karena dieksploitasi besar-besaran, tetapi lebih dari itu SDM dengan segala dimensinya tidak lain adalah menghargai tinggi, menaruh hormat dan menempatkan secara proporsional manusia sebagai esensi kehidupan. Dengan kata lain, menempatkan SDM dengan segala dimensinya dalam proses pembangunan tiada lain adalah menghargai manusia demi keberlangsungan kehidupan manusia (human survival) itu sendiri yang memegang teguh etika, nilai dan kultur kemanusiaan.

Pembicaraan SDM akan lebih aktual lagi jika dihubungkan dengan dimensi organisasi, seperti halnya organisasi kemasyarakatan mahasiswa — selanjutnya OKM — dalam segala mekanismenya. Dalam dimensi sosial politik, OKM merupakan sumber kader dan basis rekruitmen kepemimpinan, dan menjalankan fungsi-fungsi yang lain seperti *artikulasi, sosialisasi, komunikasi, pendidikan dan agregasi kepentingan politik*. Dalam dimensi konfigurasi kekuatan politik (political power configuration), OKM merupakan salah satu agen kekuatan politik yang mampu melakukan kontrol politik dan memaksakan membuat sejarah. Predikat demikian sudah menjadi trad mark OKM dalam kesejarahannya. Permasalahannya, mampukah OKM menjalankan fungsinya? Dan seberapa besar pengaruh OKM dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembuatan sejarah ? Hal itu semua sangat tergantung pada kualitas SDM yang dimiliki OKM. SDM bagi OKM tiada lain adalah sumber kehidupan. Hanya dengan SDM yang berkualitaslah, sebuah OKM dapat melaksanakan fungsi dan yang berkualitaslah, sebuah OKM dapat melaksanakan fungsi dan memiliki kekuatan yang efektif dan prima.

Meskipun OKM sudah mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan SDM, tetapi masih dalam tataran *karikatural, reaktif dan fluktuatif. Karikatural*; dalam arti tidak menyentuh pada essensiSDM, hanya sekedar menunjukkan eksistensi organisasi. *Reaktif*;dalam arti bukan menjadi gerakkan kesadaran*inner dynamics*, melainkan pada rangsangan*outer dynamics*. Dan *fluktuatif*; dalam arti tidak terbingkai secara *regulatif dan universal* (ada follow up secara kontinyu) dalam paket yang sempurna. Pelaksanaan program SDM oleh OKM demikian, karena OKM dan ormas-ormas lain pada umumnya mempunyai penyakit yang cukup akut dalam suatu pesakitan yang cukup kronis.

Kader yang baik adalah mereka yang berangkat dari bawah

Penyakit tersebut antara lain : Pertama, hampir seluruh kegiatan selalu bertendensi politik praktis. Karena itu pola kegiatannya hanya bersifat pengelabuhan terhadap pihak pemerintah. Kedua, jarang terjadi kegiatan yang mempunyai implikasi dan berakses ke dalam sebagai tuntutan atas kebutuhan warga anggotanya. Ketiga, memandang secara dikotomis terhadap kekuatan luar (penyandang dana, pemerintah, sponsor dll), dalam arti jika ia bermanfaat bagi OKM maka perlu dirangkul, dan jika tidak bermanfaat perlu digebuki. Keempat, dari ketiga penyakit tersebut mengakibatkan lemahnya kepedulian sosial dan tipisnya nurani kemanusiaan serta lambatnya kedewasaan dalam sikap beroerganisasi di kalangan ormas mahasiswa. Empat penyakit tersebut merupakan kendala sebuah OKM, sekaligus menunjukkan kerentanan SDM yang dimilikinya.

Hampir seluruh OKM mempunyai sistem dan mekanisme pengkaderan dengan wilayah kemanfaatan secara individual (kualitas diri), secara organisatoris (kader organisasi) dan secara kemasyarakatan (kader bangsa). Dengan demikian, OKM meskipun dengan segala kekurangannya sudah mampu menyiapkan SDM sebagai pengelola dan pengatur kehidupan manusia. Kekurangan dan kelemahan tersebut dalah suatu hal yang wajar dalam proses pencarian jati diri. permasalahannya, jangan OKM lantas membanggakannya, melainkan harus menyempurnakannya.

Arti penting penyempurnaan pengkaderan dan peningkatan SDM oleh sebuah OKM selain merupakan sumber kekuatan yang baru bagi OKM sendiri, juga merupakan kader yang dibutuhkan oleh zaman. pendek kata, OKM adalah pensuply kader dalam kehidupan dengan segala domainnya (masyarakat, bangsa dan negara). Mahasiswa sebagai komponen OKM tersebut dalam sejarahnya selalu menunjukkan sebagai pemimpin, dan mahasiswa yang memiliki kualitas SDM yang prima selalu menjadi rebutan ormas, orsospol dan birokrasi yang lain, sedangkan kepemimpinan OKM adalah sarana pendidikan sekaligus modal dasar bagi kepemimpinan lebih lanjut dalam skala yang lebih luas.

Keberhasilan menapaki jenjang karir kepemimpinan dan kualitas SDM dalam kehidupan nyata sangat dipengaruhi — bahkan ditentukan— oleh apresiasi dan pergumulan ketika menjadi mahasiswa. Hanya saja seringkali dijumpai ada kalanya ketika mahasiswa sangat aktif dengan kualitas yang prima, tetapi dalam kehidupan nyata tidak menempati dan tidak mempunyai kelas yang sepadan. Untuk menjawab kesepadanan tersebut, sangat ditentukan oleh hubungan segitiga secara mutualis simbiosa, yaitu 'bibit' SDM, mekanisme pengkaderan, dan lingkungan kerja. Seseorang kader mahasiswa yang memiliki keunggulan dengan ketelatenan merawatnya dan tumbuh di lingkungan yang kondusif dalam sistem sosial-politik yang demokratis, maka ia akan muncul sebagai pemimpin yang tahu kerja, tahu misi dan tahu diri. Kinerja tokoh dan pemimpin tipe demikian mempunyai produktifitas yang tinggi, kuat akar dalam basis masa sosial dan utuh integritas kepribadiannya. Tetapi meskipun ia merupakan bibit yang unggul, oleh karena hidup di lingkungan dan sistem sosial-politik yang nepotis, maka ia hanya menjadi 'tumbal perjuangan' yang tertulis dalam prasasti kehidupan.

Proses pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tersebut dapat dianalogkan seperti menimba air dalam sumur. Dalam proses ini diperlukan air yang higienis, suci, bersih (bibit unggul), diperlukan seorang yang mengangkat dari dasar sumur sampai keatas (lingkungan), dan juga diperlukan perangkat atau instrumennya sendiri, seperti karet, timba, kerekan dan lain sebagainya. Dalam analogi demikian dapat diambil sebuah pelajaran, bahwa kader yang baik adalah mereka yang berangkat dari bawah. Air -kader- yang jernih dan bersih serta suci adalah yang muncul dari kedalaman sumber mata air. Ia bersih, tidak terkontaminasi oleh virus; ia bening tidak mudah kena glontor lumpur dan kotoran. Kemampuan memadukan ketiga komponen tersebur akan bisa memancarkan air yang dapat diminum dan menyehatkan badan. Kader yang bisa menghidupi diri, dan bermanfaat bagi dunia sekelilingnya, orang lain dan bangsanya merupakan output yang tak ternilai harganya. Bukankah kader dan SDM merupakan air dan sumber kehidupan ? ke arah itulah seharusnya kiprah dan pengabdian OKM ditujukan !



Machrus Ali (Ketua Umum PMII Komisariat \Airlangga, Mhs FH UNAIR)

"KITA SEMUA BUTUH..., KARENA KITA PUNYA MUSUH !"

(Sebuah catatan dari "Peristiwa Pembungkaman" suara kaum muda Katolik di negerinya sendiri)

Kediri, sebuah kota kecil dibelahan Jawa Timur, yang melihat sejarah "pembungkaman" suara anak-anak negeri. Tepatnya tanggal 22 hingga 25 Juni 1995, pada sebuah pesta muda-mudi katolik yang digelar dikota tersebut.

Pesta Berakhir, Kesadaran Terbuka

Pesta akbar muda-mudi Katolik,tentulah sebuah acara besar yang cenderung mewah dan penuh "penanaman kesadaran palsu". namun ternyata tak semua kaum muda Katolik terlena dengan kehadiran "pesta" tersebut. Kaum muda Katolik Santo Stefanus, salah satunya. Kaum muda Katolik dari Surabaya tersebut ternyata membawa suara kritis mereka, yakni pemahaman akan "kemerdekaan" di tanah airnya ini. Bahwa ternyata kemerdekaan sejati belumlah sepenuhnya menjadi milik rakyat dan dinikmati oleh rakyat. Tetapi, sadar atau tidak sadar, suara kritis adalah berarti perang melawan kekuatan "status quo". Dan itulah yang memang terjadi.

Stand penjualan kaos berslogan politis dan pelayanan informasi kritis dari kaum muda Santo Stefanus disegel, baca puisi yang mereka lantangkan harus diredam, nyanyian lagu-lagu kritik sosial dari mereka terpaksa harus distop. Semuanya adalah demi keamanan dan ketertiban "pesta" tersebut. Namun sebenarnya lebih jauh lagi adalah demi terjaganya kepentingan "penguasa" untuk menyusup pada acara akbar tersebut.

Kekalahan kaum muda Katolik Santo Stefanus cukup telak. Bagaimana tidak, mereka dituding dengan tuduhan "pemberontak" ataupun "radikalis" yang kemudian membawa mereka pada ancaman "diamankan". Serangan untuk mereka, dilakukan oleh aparat keamanan setempat. Lebih ironis lagi bahwa mereka pun diserang pula oleh para panitia pesta dan sebagian kaum berjubah yang pro "status quo". Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan (Stop! Jangan ber-romantisme).

Kondisi material sebuah lingkungan sosial akan membuka kesadaran pemikiran pada taraf yang lebih maju. Pesta itu telah usai. namun bukan berarti kekuatan kaum muda Katolik Santo Stefanus harus usai pula. Justru kesadaran akan ke-resistanan mereka kian terwujud dengan munculnya bentukan baru mereka yakni, ALIANSI MUDIKA INDEPENDEN. Sungguh suatu bangunan kesadaran pemikiran yang maju. Kondisi perlawanan mereka berarti bukan semakin mundur, tetapi kian maju. Maju untuk sebuah langkah "berani" bersuara kritis di tangah belenggu emas bersimbol kemerdekaan yang terpasang indah di bangsa mereka.

Kita Butuh Organisasi

Seharusnya kesadaran kita bukan sekedar budaya resist semata yang terwujud dalam aksi/tindakan, atau lebih jauh bicara tentang sebuah perubahan masyarakat atau revolusi. Namun kesadaran akan adanya "musuh bersama" yang ada di depan kita. Ketertindasan kita adalah jalan awal untuk mendongkel kesadaran palsu yang tercetak begitu lama di otak kita. Musuh bersama itu telah melakukan penindasan. bukan sekedar perbudakan. Penindasan adalah lebih keji, karena di dalam penindasan ada penanaman kesadaran semu yang nantinya akan digunakan untuk melangsungkan penghisapan . Sementara itu kita cenderung berpikir untuk "lawan" dan "lawan", tanpa kesadaran akan pemahaman kondisi obyektif. Jika kita hanya berpikir tentang senjata maka itu artinya kita berpikir tentang perang, dan itu artinya adalah korban yang berjatuhan. Bukan sekedar itu. Seorang revolusioner atau pejuang kemerdekaan manusia tanpa rasa kemanusiaan, hanyalah sebuah peluru yang siap mengoyak tubuh lawan. Sekali lagi kesadaran dan pembentukan tingkat pemikiran yang maju, inilah yang dinamakan dengan revolusi kebudayaan. Jika pembangunan kesadaran telah kokoh (hancurnya kesadaran semu) maka revolusi hanyalah sekedar menunggu hari H, karena sudah menjadi kebutuhan dan keharusan sejarah. Namun jika pembangunan di tingkat pemikiran/kesadaran masih rapuh, jangan bermimpi akan adanya sebuah revolusi.

Disinilah akhirnya kita perlu sebuah organisasi, dan bukan pe-mobilisiran. Di dalam organisasi tersebut penerapan kerja pendidikan penyadaran amatlah sangat diperlukan dan harus dilakukan untuk pembangunan kesadaran baru yang maju. Namun organisasi bukanlah hal mudah. Di sini lebih dari sekedar solidaritas namun rasa setia kawan betul-betul dituntut (kembali pada seperti yang diungkapkan oleh **Paulo Freire**, *Pendidikan Kaum Tertindas*).

Kondisi obyektif di negeri ini adalah bahwa rakyat sudah lama tak mencatat perlunya sebuah pengorganisiran. Organisasi rakyat, adalah hal yang asing dan tak terdapat dalam agenda kehidupan rakyat di negeri ini. Bagaimana tidak, 30 tahun lebih rakyat harus menerima organisasi yang dilegalkan oleh penguasa, dan bukan organisasi inisiatif rakyat. Tahun 1960-an adalah sejarah yang mencatat betapa seabreg-nya organisasi rakyat bermunculan dan tumbuh untuk memperjuangkan hak-hak manusia/hak-hak rakyat. Apa yang terjadi setelah Orde Baru berdiri tegar? Hancurlah semua organisasi rakyat, yang ada hanyalah organisasi perpanjangan tangan penguasa.

Organisasi rakyat adalah organisasi "perang abadi" oleh rakyat untuk melawan penindasan; kemiskinan, kebodohan-pembodohan, ketergantungan, perampasan hak manusia; dan menciptakan sebuah "dunia baru" bagi mereka. Hukum sejarah telah berulang kali mengajarkan kepada kita bahwa tak akan ada perubahan masyarakat tanpa terbentuknya organisasi di masyarakat itu sendiri. Kita butuhkan organisasi, dan adalah keharusan sejarah untuk mewujudkan organisasi tersebut. Sekali lagi yang perlu kita ingat bersama, bahwa taktis-strategis adalah tak boleh dilupakan untuk sebuah langkah organisasi. Organisasi haruslah membicarakan persoalan kerja yang potensial, bukan ribut dengan persoalan "kulit" semata, tapi substansi.

Bersama kita akan wujudkan organisasi untuk memperjuangkan langkah "hari yang lebih pasti", dimana penindasan dan penghisapan akan mengalami peminimalan dan kemerdekaan rakyat akan dimaksimalkan.

Aliansi Mudika Independen

Suatu bentuk langkah yang kongkrit yang harus lebih dikongkritkan lagi adalah munculnya kerja organisasi dalam sebuah organisasi. Itu hal yang harus kita pahami bersama. Apa makna sebuah organisasi rakyat, bila kerja organisasi dalam menggali basis potensial rakyat yang menjadi sebuah kekuatan besar untuk menumbangkan "musuh bersama" tak pernah dilakukan? Ini adalah suatu persoalan yang harus terjawab oleh kaum muda Katolik Santo Stefanus yang "maju" dalam menelorkan konsep Aliansi Mudika Independen.

lihat halaman 12...

Mental Penguasa & Pejuang Demokrasi

Refleksi

Dalam setiap tahun ajaran baru begitu banyak kegiatan penataran P-4 di semua cabang-cabang instansi, yang secara khusus dan banyak dilakukan di instansi pendidikan. Bentuk penataran ini rata-rata memakai metode yang sama dan lebih pada ceramah yang serba monolog. Akhirnya banyak yang beranggapan bahwa penataran bentuk semacam ini bukan sebagai penanaman ideologi tetapi lebih pada intervensi filsafat hidup dan bukan lahir dari kesadaran diri. Hal ini banyak terjadi ketika selesai mengikuti penataran, dan masih baru. Tentu saja mudah dan masih hafal tentang Pancasila, sampai begitu mudah untuk merealisir ke dalam bentuk tindakan. Namun, itu hanya seperti "hangat-hangat tahi ayam" karena begitu penataran selesai maka nilai-nilai Pancasila sedikit demi sedikit luntur bahkan mungkin telah hilang hanya tertinggal "bolot-bolot"nya saja.

Tidak bisa dipungkiri banyak yang menginginkan Pancasila diubah, baik pada peristiwa DI/TII ataupun G30S/PKI. Walaupun keadaan stabilitas nasional telah aman, bukan tidak mungkin bahaya mengancam. Bergulirnya demonstrasi dimana-mana dan unjuk rasa yang sudah diatur, bukan tidak mungkin ada gejala pemanfaatan massa untuk menggoyang pemerintah yang berideologi Pancasila. Terlepas dari itu bagaimana pada tingkat elite politik juga telah terjadi peperangan sendiri yang terlihat tidak sinkron seperti beberapa peristiwa yang melibatkan Sri Bintang Pamungkas, Bambang Warih, pembredelan Tempo dan Editor, pencekalan Gus Dur, Emha Ainun N, dan masih banyak lagi gambaran pentas sandiwara kaum elite politik.

Para penguasa yang mencari muka sedang beradu untuk mendapatkan kepercayaan terhadap penguasa tunggal (untuk saat ini, karena belum ada yang menggantikan). Bagaimana para "tanduk-tanduk" yang selalu dibuat tidak merdeka agar tampak bahwa single patron tetap menang di mata wakil rakyat. Campur tangan pihak pembina daerah yang secara jelas tidak netral lagi, membuat banyak kalangan menilai tidak adil dan demokratis. Semakin keruh perdebatan para tanduk-tanduk semakin membuat sang single patron menjadi yakin akan tiga tahun mendatang. Tampaknya perdebatan panjang ini belum ada tanda-tanda akan berakhir karena sang "bapak" belum menghendakinya.

> ...begitu penataran selesai maka nilai-nilai Pancasila sedikit demi sedikit luntur bahkan mungkin telah hilang..

Tidak bisa tidak, kita telah melihat bahwa pimpinan eksekutif saat ini merupakan mantan pimpinan dari tokoh-tokoh "legislatif". Kenyataan ini merupakan salah satu penghambat dari jalannya tugas dan fungsi kaum legislatif yang ada sekarang, karena untuk culture bangsa kita masih menganut kepercayaan istilah "pakewuh". Sehingga bukan tidak mungkin apa yang dilakukan kaum legislatif selalu menjadi pantauan kaum eksekutif. Sementara keadaan demikian jauh menyimpang dari Undang-undang yang ada. Seperti peristiwa Kedungombo, dan Marsinah yang belum berakhir sampai sekarang. Di beberapa daerah juga terlihat semakin banyak rekayasa terhadap juklak yang diturunkan oleh sang Patron, sampai-sampai untuk berbicara saja begitu diatur dan harus di"seragamkan"kan agar tidak terjadi hal-hal yang "tidak diinginkan"? Begitu ketatnya segala bentuk rekayasa terjadi, bencanapun tidak lepas dari rekayasa, seperti peristiwa Merapi di Yogyakarta dan yang baru terjadi Haul Bung Karno di Blitar.

Sementara peristiwa demo dimana-mana telah mewarnai kaum mahasiswa yang "katanya" berpihak kaum lemah, demi tegaknya keadilan. Ketika mahasiswa mempunyai idealisme yang tinggi dan sikap yang tegas sangat diperlukan, namun pengkhianatan idealisme adalah suatu yang menjijikkan. Bagi kalangan mahasiswa, demonstrasi adalah bentuk ungkapan keberpihakan demokrasi, namun bagi kalangan pejabat bentuk itu adalah menyalahi aturan atau tidak benar. Kalau ditarik benang merahnya memang mahasiswa harus jeli melihat mana yang substansial dan mana yang instrumen, mana inti dan mana kulitnya. Banyak kalangan mahasiswa berjuang tanpa konsep yang jelas, sehingga pada saat dirinya dipertemukan dengan hal-hal yang harus mengkhianati perjuangan, merelakannya. Sementara tidak banyak yang mempunyai perjuangan gigih mempertahankan idealisme.

Bagi kalangan yang menyatakan bahwa dirinya berpihak pada rakyat, memihak kaum miskin, memperjuangkan demokrasi dan keadilan, akan sangat kritis pandangannya terhadap kejulingan sikap penguasa, baik yang berada di intitusi, daerah, propinsi maupun nasional. Sikap kritis ini sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya keadilan dan demokrasi. Kritis dalam artian bukan hanya mengkritik dan melakukan tindakan kritis saja, tetapi haruslah disertai tindakan berikutnya.

Amat disayangkan, kebanyakan aksi yang telah dilaksanakan tidak punya follow-up atau tidak ada alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada (what next?). Sehingga ada kesan atau memang benar, bahwa aksi yang terjadi memang telah diatur bahkan dibiayai oleh pihak ketiga atas dasar keinginan pihak pertama. Sungguh suatu yang ironis dan merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang telah diperjuangkan bersama. Tidak jarang antar sesama demonstran saling tuduh dalam menerima hasil rekayasa.

Pandangan tentang keberpihakan kaum lemah/miskin merupakan penjabaran dari semangat social consent, namun tidak jarang terjadi semangat yang berlebihan. Akibatnya semua pandangan Marxis digunakan sebagai ideologi tanpa memberikan refleksi kritis terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat kaum marginal. Akhirnya bukan tidak mungkin terjadi demonstran seperti suporter sepak bola yang selalu melibatkan pihak keamanan dan selalu membuat ulah agar disebut sebagai pembela keadilan dan kaum lemah. Mereka tidak berpikir apa yang harus diperbuat setelah melakukan aksi, untuk apa mereka memperjuangkan keadilan sementara terjadi kesenjangan terhadap dunia mahasiswa saat ini?

Memperjuangkan tegaknya Pancasila tidak selalu harus dengan aksi demonstrasi, namun dengan kesungguhan dalam bertindak, berucap, bertingkah laku, berbuat, berpihak, dan berpikir secara makro demi tetap tegaknya ideologi kita yang selama ini hanya dijadikan sebagai "ban serep". Jika ada pergeseran saja digunakan, namun jika pergeseran itu menguntungkan pihak pemegang kuasa, tetap dibiarkan. Akankah hasil penataran P4 kita demikian? Dapatkah para pemegang kuasa memberikan contoh yang obyektif dan gentlement terhadap yang ditatar? Mudah-mudahan dengan masuknya mahasiswa baru, semuanya akan menjadi baru dan bukan barang lama diganti dengan bungkus yang baru. Sebab pada akhirnya semua akan bermuara pada paribasan Jawa yang mengatakan "*sing becik ketitik sing ala ketara*" yang artinya siapa yang menanam benih kebaikan akan menikmati kebaikan, siapa yang menanam kejahatan akan menikmati buah kejahatan pula.

Akan terlihat dua sisi yang jauh berbeda antara pejuang penerus pembangunan dengan pihak penguasa. Hal ini yang

lihat halaman 12...

Sastra & Budaya

TEATER RAKYAT UNTUK PEMBEBASAN

(Suatu Praksis Penyadaran Melalui Pendekatan Budaya)

Dalam perjalanan sepulang misa Minggu Pagi, Fransiska harus menghentikan langkahnya tatkala dari arah depan berlarian banyak orang sambil sesekali terdengar teriakan dan jeritan dari mereka. Rupanya ada penggusuran Pedagang Kaki Lima oleh petugas Tibum. Fransiskapun termangu. Masih terngiang jelas bacaan Injil dan kotbah Pastor tentang ORANG SAMARIA YANG MURAH HATI. Timbul konflik batin dalam diri Fransiska. Namun akhirnya ia bersikap seperti orang Lewi yang tidak berbuat apa-apa dan dengan berat hati berlalu dari tempat kejadian.

Situasi di atas banyak kita jumpai di masyarakat, dimana kenyataan yang ada mengundang kita untuk menyikapinya. Sering kali hal tersebut akan membuat umat kristiani menjadi linglung. Tuntutan iman kristiani mendorong untuk melakukan sesuatu, tetapi banyak pertimbangan yang menghalangi langkahnya. Akhirnya tak berbuat apa-apa.

Akan tetapi memang benar bahwa umat kristiani tak berbuat apa-apa? Bukankah kepedulian sosial tidak merupakan barang asing lagi di kalangan umat kristiani. Seminar tentang kepedulian sosial banyak diadakan, terutama pada masa pra Paskah. Kelompok studi dan studi menjamur dimana-mana, terlebih dikalangan mahasiswa. Mereka beramai-ramai membahas persoalan kemiskinan, hak asasi, juga keadilan. Entah benar-benar peduli, ataukah karena sedang menjadi trend?

Model yang demikian itu dikenal sebagai model bank pengetahuan. Orang menaruh modalnya dalam bank, kemudian dapat diambil sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan. Kita juga mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kita simpan dalam otak sewaktu-waktu kita pakai jika dibutuhkan. Otak kita penuh dengan teori-teori, prinsip dan konsep. Pola tindak yang ada kemudian seringkali seminar-seminar yang terlampau asyik memperdebatkan konsep dan teori yang mendasari. Padahal suatu teori tak akan lahir tampa tindakan, tanpa sejumlah pengalaman. Jangan lupa aksi selalu mendahului.

Mendiskusikan pembebasan sah-sah saja. Tetapi melakukan tindakan pembebasan itu lain soal. Tidak ada salahnya membuat seminar-seminar tentang keterlibatan sosial. Tapi ikut memperjuangkan ganti rugi yang layak pada kasus pergusuran tanah tidak sama dengan mengadakan seminar tentang ganti rugi yang layak. Membuat pernyataan yang pedas tentang penindasan hal asasi manusia yang dimuat di koran sudah mendingan. Tapi mencoba membela kawan-kawan kecil yang tak sempat menikmati masa kanak-kanak dan banyak bertebaran di sudut-sudut Malioboro, itu sungguh suatu yang berarti.

Umat kristiani tak ingin terjebak menjadi hari-hari omong kosong. Menjadi orang yang kenyang teori dan konsep tetapi tak punya keterlibatan konkrit. Sudah waktunya ditinggalkan nasihat orang tua untuk mengucap syukur atas kemakmuran negeri ini ketika kita nonton kelaparan di Afrika pada layar televisi. Atau menyikapi kredit macet sekian triliun dengan janji untuk tidak berlaku demikian jika kelak menjadi menteri.

Keterlibatan dapatlah diartikan sebagai usaha perluasan ruang gerak bagi kaum yang dipihaki untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang manusiawi dalam segala dimensi. Adapun pihak itu dapat melalui proses yang berupa:
1. Penyadaran
2. Pendidikan terus menerus
3. Pengorganisasian
4. Aksi



Tulisan ini hanya akan mengulas fase penyadaran dalam kaitannya dengan upaya pembebasan.

Penyadaran merupakan upaya bersama rakyat yang bermuara pada pemilikan pengetahuan akan situasi penindasan potensi dan alternatif untuk melawan penindasan. Kemudian diketemukanlah kekuatan rakyat untuk mengadakan tawar menawar dengan penindas.

Musuh pembebasan berupa tindak pembodohan rakyat oleh penindas yang menjadikan rakyat tidak mengetahui situasinya (penindasan atas dirinya), pasrah tanpa daya karena tak mempunyai kekuatan, pesimistis karena seluruh peluang telah tertutup. Rakyat menjadi bisu, tuli dan lumpuh dalam arti tertentu.

Banyak media massa yang akhirnya menjadi alat pembodohan massa. Baik isi pesan yang disampaikan maupun sebagai media yang menjadikan rakyat terasing dengan situasinya sendiri. Sebagai media, jelas media massa tidak dapat diakses oleh rakyat. Mereka hanya menjadi penonton, pendengar dan pembaca.

Media penyadaran haruslah menjadi sebuah media yang dimiliki rakyat, sehingga rakyat dengan bebas menentukan isinya. Syarat berikutnya media tersebut harus dapat dipergunakan oleh rakyat kebanyakan bukan barang asing, melainkan sudah akrab bagi rakyat.

TEATER RAKYAT menjadi pilihan sebagai media penyadaran karena sesuai dengan kebutuhan jenis media dan aspek-aspek teater rakyat. Ludruk, kethoprak lenong dan teater tradisional lainnya telah akrab bagi masyarakat umumnya. Dengan mudah rakyat dapat mempermainkan tanpa tergantung dengan kenaikan harga kertas atau tukang servis radio / televisi.

Alur cerita pada teater tradisional sebagian besar dibuat untuk mendukung penguasa saat itu. Oleh karenanya sering kita jumpai akhir adegan berupa kemenangan pihak penguasa dan hancurnya pihak penentang. Plot yang demikian inilah berpatri dalam benak rakyat bahwa penguasa selalu benar dan menang. Tanpa ada peluang untuk menilai tindakan penguasa secara kritis. Untuk itulah dibutuhkan suatu naskah teater rakyat baru yang isinya tindak membuat rakyat menjadi pasif, hanya menerima saja. Tetapi suatu naskah yang menantang untuk berpikir dan menemukan alternatif tindakan. (Inilah yang mendasari terbentuknya TEATER RAKYAT pada masa sekarang).

Kepada mereka yang mempunyai komitmen pada pembebasan rakyat, tantangan ini diberikan untuk mendampingi mereka guna memakai media penyadaran yang akrab dimiliki rakyat, namun tidak melenakan melainkan menantang untuk berpikir dan bertindak. Pendampingan ini merupakan keterlibatan konkrit membangun dan bersama rakyat !!!

Selamat berjuang.



Yogyakarta, Juli 1995

Goen - Vela
(Mhs. UGM,
anggota institut Teater Rakyat Yogyakarta)

DI BUMI KECIL INI

di bumi kecil ini
kami pakai jiwa
buat mengorek liang-liang hati mereka
hati yang telah mengeras bagai batu
Bukan buku, pena dan mulut-mulut intelektual berbau
yang jadi nyanyian kedamaian
tapi derap langkah kebenaran
yang menjadi kidung abadi bagi kami

Atas nama cinta dan nurani
tidak ada kata tak pantas
untuk ikut serta perjanjian suci ini
mari undang kawan-kawan
semua.....ya, semua....tak terkecuali...

Mari kita mulai dari kertas putih
Kita tutup saja lembaran yang sudah usang itu.

Surabaya, Oktober 1995
Sihar Ramses Sakti

NASIHAT BUMI NUSANTARA

Nasihat bumi Nusantara kepada kami!
biarkan mawar dan melati saja
yang terus tumbuh di sini
sirami mereka dengan kebersamaan kita
jangan sampai jamur dan tumbuhan-tumbuhan liar
menyeruak diantara bunga-bunga kita tercinta.

Surabaya, Juli 1995
Sihar Ramses Sakti

KITA ADALAH SATU

Yang benar mungkin tersamar..............
Yang salah mungkin kabur...............
Yang nyata tiada jelas.............
Yang semu tiada beda............

namun tidaklah perlu kita cari, bongkar.........
atau tampakan perbedaan
Sebab itu............
akan kembali........
mungkin tersamar...........
mungkin kabur tiada jelas
dan........
TIADA BEDA

11.57 jamnya kini
20121994
saat-saat semua resah dan marah
atas semuanya......yang telah berlalu
dan terlalu

kalau merdeka

kalau merdeka,
bolehkah aku membeli beras dengan murah ?
kalau merdeka,
bolehkah aku bicara jujur tentang kenyataan ?

kalau merdeka,
kapankah aku merasa keadilan keadilan berpihak padaku ?
kalau merdeka,
kapankah aku tidak tidur di emper toko ?

kalau merdeka,
bisakah anakku sekolah tampa bayar ?
kalau merdeka,
bisakah rasa takutku hilang ?
kalau merdeka, ... ?

01.18 minggu 2307 1995
buat temanku yang nanti menjadi
pejabat, pengusaha ataupun konglomerat,
tentara dan rakyat kecil.

Kontemplasi

Biarkan kuberbahasa dengan diam
bukan pula dengan isyarat
apalah lalu
Kau ternyata lebih tahu di dalam batin

biar kupandang dengan hati
manakala kupernah bicara lewat jiwa
biarlah masalalu termakan waktu dan
bersemayam dalam buih yang maya
ada masa, kata tak mampu wakili rasa

Meski tanpa sirat
sungguh banyak hal bisa tersurat
sebab kita tidak membisu
sebab kau tahu artinya
sebab diampun bahasa
Diampun adalah doa

(ambar, nina, & Mpu endro)

Buat amigo-amigo '95 :

Selamat Datang Adik Baru

Beberapa Prinsip Ajaran Gereja Katolik

Kondisi sosial berubah dan gereja mengantisipasi dengan menjawab perubahan itu, akan tetapi ajaran dan kerja sosialnya tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak berubah.



Hidup berasal dari Tuhan

Pribadi manusia adalah pusat daripada pandangan sosial katolik dan objek dari tindakan sosialnya. Gereja mengajarkan bahwa pribadi memiliki martabat hakiki yang bukan berasal dari suatu kualitas manusia tertentu, hasil pencapaian sesuatu, ras, atau jenis kelamin, umur atau status ekonomi, melainkan merupakan hadiah dari Tuhan sehingga tidak boleh dilanggar

Tiap Orang memiliki Hak Dan Kewajiban

Dari martabat pemberian tuhan tiap pribadi memiliki hak dan kewajiban asasi. Dalam hal ini termasuk hak untuk hidup sendiri, untuk kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama, untuk pindah kenegara lain, untuk hidup tanpa diskriminasi, untuk membangun keluarga dan mencukupi kebutuhannya melalui pembagan kekayaan alam secara adil, untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, pelayanan sosial, pekerjaan, dan semua hal lain yang menjadikan hidup benar-benar manusiawi. Bersamaan dengan hak-hak ini ada kewajiban antar sesama, kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat kita ; kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan bekerja untuk kebaikan bersama.



Manusia bersifat sosial

Pribadi manusia tidak hanya kudus, tetapi juga sosial. Sebagai mahluk sosial kita mengaktualisasikan martabat dan hak-hak kita dalam hubungan dengan sesama dalam komunitas.

Tidak ada komunitas yang lebih vital dari pada keluarga yang merupakan sel dasar dari masyarakat dan yang menyediakan kondisi yang dibutuhkan untuk kehidupan sosial manusia. Disana kita mempelajari nilai-nilai kita dan bertindak sesuai dengannya, dan pengalaman ini berpengaruh besar pada keadilan sosial di komunitas yang lebih besar.

Negara dan badan-badan sosial dan ekonomi adalah alat-alat untuk melindungi hidup, martabat, dan hak-hak manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas kita, dan untuk mencapai kebaikan bersama. Meskipun memiliki keterbatasan, kewajiban ini harus diemban dengan adil dan penuh perasaan.

Kita juga mempunyai tanggungjawab dan hak untuk berperan serta dalam urusan-urusan komunitas ,dan pembentukan pemerintah, untuk ambil bagian dalam menjalankan badan-badan tersebut dan dalam penyusunan serta penerapan kebijakan-kebijakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.

Penghargaan terhadap kerja

Kerja adalah lebih dari sekedar mencari nafkah. Ia merupakan ekspresi martabat kita dan suatu bentuk partisipasi yang terus-menerus terhadap penciptaan Tuhan. Orang mempunyai hak atas kerja yang pantas dan produktif, atas keamanan yang wajar dan upaya yang adil, atas pemilikan pribadi dan inisiatif ekonomi, dan untuk bergabung dalam serikat dan persatuan pekerja sesuai pilihan mereka. Ekonomi ada untuk melayani masyarakat dan bukannya masyarakat untuk ekonomi.

Pilihan kepada yang miskin dan rentan

Orang miskin dan rentan menduduki tempat istimewa dalam ajaran sosial Katolik, seperti dalam perumpamaan tentang pengadilan terakhir dimana digambarkan bahwa masyarakat diadili berdasarkan tingkat kesejahteraan anggota - anggotanya yang lemah. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjawab kebutuhan semua sesama kita, tetapi tradisi menghimbau kita untuk mendahulukan kebutuhan mereka yang miskin dan tak berdaya. Kita juga dihimbau untuk mencari cara-cara kreatif untuk mengembangkan cita-cita demokratis yang terkandung dalam hak-hak pribadi dan kebebasan hidup ekonomi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar untuk hidup dengan bermartabat dapat dijangkau oleh semua orang.



Kebutuhan akan solidaritas

Kita adalah suatu keluarga manusia, tanpa memperdulikan perbedaan kebangsaan, ras, suku, ekonomi, dan ideologi. Dalam dunia yang saling tergantung, tanggungjawab kita terhadap sesama satu sama lain melampaui batas-batas negara, dsb dan "*mengasihi tetangga kita*" memiliki arti global. Konflik kekerasan dan penyangkalan martabat dan hak-hak siapapun, dimanapun dan kapanpun akan mengurangi kesejahteraan semua. Thema solidaritas, yang sangat ditekankan oleh PAUS YOHANES PAULUS II, bersumber dari perhatian gereja terhadap perdamaian dunia, perkembangan global, lingkungan , dan hak-hak asasi internasional ; merupakan ekspresi konstitusi dari tradisi tubuh mistik.

Misi sosial Katolik adalah lama sekaligus baru. Sebagai sesuatu yang lama ia adlah tradisi yang perlu diteruskan. Sebagai sesuatu yang baru ia adalah tantangan yang perlu dijawab. Meskipun begitu ajaran sosial Katolik bukanlah suatu cetak biru suatu sistem sosial alternatif. Jauh lebih dari itu. Ia mendefinisikan, menjelaskan, dan membela nilai-nilai yang menjadi tolok ukur moral bagi setiap sistem, setiap negara, dan setiap komunitas.

Kebutuhan si miskin adalah yang terutama. Pribadi dihargai lebih dari benda-benda. Moral lebih penting dari pada tehnologi. Hidup kita diukur bukan berdasarkan apa yang kita punyai melainkan mendasarkan siapa kita, bagaimana kiat saling mengasihi, bagaimana kita memberikan sumbangan bagi kebaikan bersama, bagi keadilan di komunitas kita, dan bagi perdamaian kita.

Ini membangkitkan pertanyaan : "Apa yang seharusnya kita perbuat?" dan bukannya "Apa yang bisa kita perbuat ?"

EUSEBIUS BRAM - FK UA 89

Diterjemahkan dari : "DO YOU KNOW ?" - The Catholic Church's Teaching on Life, Work, Wealth, Justice and You.



Warta Singkat

Jambore Kaum Muda se-Keuskupan Surabaya 23 - 25 Juni 1995, Pohsarang Kediri. Peserta yang hadir 1700-an orang, mulai dari usia SMP sampai mahasiswa tahun terakhirpun ada.

Misa + syukuran HUT KMK St. Aloysius Gonzaga 1 Juli 1995 di SMKK Mater Amabilis. Bersyukur, bernyanyi, berdoa, dan yang pasti : makan-makan !

Pertemuan Nasional KMK 8 - 13 Agustus 1995 di Wisma Sejahtera Kaliurang Yogyakarta. Unair mengirim 4 orang wakilnya, semoga tidak menjadi forum NATO (No Action Talk Only)

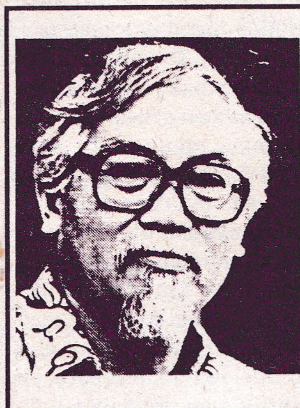
FUI-PJPMKFKU, pertemuannya KMK Kedokteran se-Indonesia, berlangsung 8 - 12 Agustus di Bandung

Kaderisasi Angkatan 1994 21 - 24 Agustus 1995 di Wisma Aloyisii, Celaket

Seminar KB Alami 28 Agustus 1995 di RKZ oleh FKU

Sosok

Romo Mangun : Harus Ada Pendewasaan Nation



Yogyakarta, Amigoz

Semaraknya perayaan pesta tahun emas kemerdekaan Indonesia, diwarnai pula oleh berjibunnya kasus kasus "ketidakmerdekaan" pers. Sepanjang sejarah berdirinya Republik ini, peranan pers dalam perjuangannya untuk memproduksi informasi bagi rakyat, terlepas dari sisi bisnis pers, mempunyai arti penting bagi pengembangan wawasan pembacanya. Namun perjalanan panjang pers Indonesia dalam kontribusinya dalam kemajuan bangsa ini tak luput puladari kekuatan kepentingan pihak pihak yang berkompeten dalam dunia pers, baik itu pemerintah, pemodal, jurnalis, wartawan, dan pembacanya. Persoalan perbedaan kepentingan menjadikan orientasi pers di Indonesia teridentifikasi, bahwa pihak pihak yang saling beradu kepentingan di sana masih perlu didorong ke arah kedewasaan dalam memandang kondisi obyektif masyarakat yang notabene masih dalam fase ketakutan.

YB Mangunwijaya, atau lebih dikenal dengan romo Mangun, pastur cendekiawan yang cukup produktif dalam duania tulis menulis, pejuang kemanusiaan, dan peraih berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri ini, mengungkapkan pemahamannya tentang kondisi pers Indonesia dewasa ini. Berikut petikan dari hasil wawancara dengan Bimo Petrus dari Amigoz yang dilakuakan di kediaman Romo Mangun, Jl Kuwera 14 Sleman, Yogyakarta.

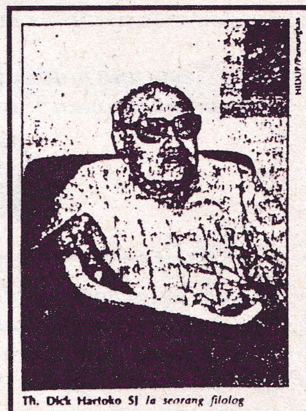
Amigoz (A): Bagaimana pendapat romo tentang sensor terhadap pers?

Romo Mangun (RM): Ya, dimana-mana penguasa kalau nggak cocok dengan pemberitaan pers ya pasti dibreidel, kecuali dinegara demokratis. Jelas ini bukan keadaan ideal, lha wong sensor kok keadaan ideal. kalau dalam keadaan darurat perang, dimana keadaan negara benar-benar gawat lha itubaru bisa diterima. Tapi kalau dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada sensor. Tapi penentuan kondisi ini subyektif. Yang satu bilang sekarang ini jaman eksplosif, ini berbahaya sekali. yang satunya bilang,keadaan sudah normal jadi boleh-boleh saja. Jadi tergantung tafsirannya masing-masing. Memang semua sensor itu berdasar pada ketakutan. Yang menyensor itu takut, kalau-kalau terjadi hal yang tak diinginkan, yang disensor juga jelas ketakutan.

A: Bagaimana orientasi pers saat ini?

RM: Ya kalau saya bilang, pers saat ini berorientasi ke bisnis. Kalau dulu mulai jaman Belanda, lalu jaman '45, pers itu adalah pers perjuangan. Lalu mulai jaman orde baru itu pelan-pelan sampai 80-an menjadi pers bisnis. Ya ada perjuangannya, tetapi hanya sepanjang tidak merugikan bisnis. Di luar negripun juga begitu, nggak ada penerbitan tanpa unsur bisnis. Tapi mereka juga punya unsur perjuangan. Seperti misalnya pengungkapan skandal Watergate yang menjatuhkan presiden Nixon itu juga suatu bentuk perjuangan. Jadi pers Indonesia sebetulnya bisa saja berorientasi bisnis sekaligus perjuangan. Tapi karena fasenya masih fase ketakutan, belum kedewasaan maka terpaksa harus pilih bisnis atau perjuangan. Jadi lebih dulu harus ada pendewsaan masyarakat, pendewasaan pemerintah, pendewasaan nation. Kalau dewasa nggak akan ada rapat harus minta ijin, seminar dibubarkan (Gus Dur & Megawati di Jombang), gelar seni dilarang (Wiji Thukul di Jogya Agustus'95) Yah memang belum dewasa seharusnya

Pater Dick : Ada Sisi Gelap Yang Tak Boleh Kita Lupakan


Th. Dick Hartoko SJ *la seorang filolog*

Yogyakarta, Amigoz

Dalam memberi pemahaman kepada generasi orde baru saat ini tentang sejarah Indonesia, ternyata peranan pers dalam hal itu menurut Dick Hartoko SJ masih sedikit. Pemimpin Umum majalah Basis yang aktif dalam dunia pendidikan tinggi. dan tulis menulis ini memberikan pemikirannya dalam wawancara singkat dengan Amigoz di Yogyakarta. Karya karya asli pastur tamatan sekolah sejarah umum dan teologi di Netherland ini banyak diterbitkan di sini, antara lain *Saksi Budaya* (1975), hingga *Tanah Airku Dari Bulan Ke Bulan* (1983), dan banyak karya terjemahannya terutama dalam bidang kebudayaan, filsafat dan sastra.

"Bahwa segala sesuatu diatur oleh Deppen" ,kata Pater Dick ketika menyikapi pertanyaan mengenai keterbatasn pers untuk memberikan penyajian secara obyektif dikarenakan struktur negara dimana pers ada di dalamnya masih terlalu kuat. Pastur kelahiran Jatiroto, Lumajang - Jawa Timur, 9 Mei 1922 ini menuturkan pendapatnya kepada Amigoz tentang pers dan budaya Indonesia.

Amigoz (A) : Bagaimana keadaan atau kondisi pers Indonesia saat ini?

Pater Dick Hartoko (DH) : Banyak mengalami luka-luka. misalnya Indonesia Raya yang dipimpin Mochtar Lubis pernah dibreidel pada jaman Belanda dan jaman orla kalau dalam masa orba bisa dilihat misalnya Tempo. Jadi ada sisi gelap yang tak boleh kita lupakan dus pers kita masih harus diperbaiki.

A: Bagaimana peran pers alternatif atau pers bawah tanah dalam mewujudkan suasana yang lebih demokratis?

DH: Adanya pers bawah tanah menunjukkan bahwa pers kita masih ada luka-lukanya dus, meski dilihat lebih pada suatu gejala dan baru-baru ini di Kompas ada peliputan mengenai peristiwa di Jember (Jenggawah, Red) Mengapa tidak di surat kabar-surat kabar lain? Sejauh saya tahu, sekali lagi kemerdekaan pers kita masih diikat.

A: Apakah keadaan kita mirip seperti pers Fuhrer di era Hitler yang menolak pluralisme dalam masyarakat dan semua harus satu ?

DH : Ada bahaya bahwa akan kesana, tapi belum, tapi ada bahaya.

A : Apakah karena struktur yang terlalu kuat ?

DH : Bahwa segala sesuatu diatur oleh deppen.

A: Untuk memasuki celah-celah dalam sistem yang represif, bagaimana pendapat romo?

DH : Ya bisa, itu kalau orang yang berani surat kabarnya siap dicabut SIUPP-nya tapi disini ada konsekuensinya, oke kalau majalah kecil hanya beberapa orang kehilangan pekerjaannya, tapi kalau suatu seperti Kompas ada ratusan pegawai yang akan kahilangan pekerjaannya inilah sebabnya menulis berita harus mengarahkan perahunya antara kemerdekaan pers dan dompet para karyawan.

A : Kalau pengalaman romo dalam pers (mengasuh Basis) ?

DH : Basis adalah majalah kecil yang sifatnya tidak secara langsung mengenai politik, tapi budaya, walaupun politik juga bagian dari budaya. Ya kadang-kadang memang ada saran dari kalangan yang berkaitan dengan redaksi, kemudian hal itu disederhanakan.

A: Jadi masih ada self-sensorship?

DH: Ya

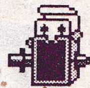
lihat halaman 12...

Kita Butuh..

dari halaman 6...

Tentunya setiap juang anak-anak bangsa akan selalu tak pernah berhenti sampai di sini saja. Tetapi "satu" adalah kekuatan yang kita butuhkan, karena kita sadar bahwa kita punya "musuh bersama". Salam Aliansi Mudika Independen dalam satu perlawanan menuju satu perubahan bagi rakyat.

David Kris
seorang mudika yang mengamati peristiwa pembungkaman suara kritis anak-anak bangsa di Kediri



Romo Mangun...

...dari halaman 11

mbok yo wis ben (seharusnya dibiarkan saja-red) Memang seni dan budaya itu perjuangan kok, tidak pernah menjadi hadiah yang tinggal mengunyah. Baru kalau sudah mati atau semaput (pingsan Red) tidak lagi ada perjuangan.

(BP,DK)

Dilarang Marah

Dipencet putih keluarnya item ?
*Jawab : ngebel (belnya kan warnanya putih) rumah (Jojoran I/ 50) yang keluar si Purwadi ...hg..hg..hg..capek ketawa...hg... ikan teri di air payau, sorry lah yau.....
by YUDHA DAN ARRI..lah yau...

Mental Penguasa...

...dari halaman 7...

membuat ketidaksinkronan antara dua kutub, sehingga akan terjadi permainan sandiwara politik antara pejuang dan penguasa. Bukan tidak mungkin hal ini akan menjadi awal dari ketidaksehatan dalam mengisi pembangunan, yang secara implisitnya hanya untuk mencari jabatan tanpa power. Jika demikian, bukan mengubah sesuatu yang baru, tetapi hanya mengganti bajunya saja. Pada pihak yang masih memperjuangkan, berkeinginan untuk selalu tetap setia pada nilai-nilai yang pro demokrasi, sedangkan pada pihak yang berkuasa juga selalu tetap pada segala bentuk rekayasa perwujudan dari demokrasi. Hanya sedikit geserannya, namun jika para pejuang demokrasi kurang menjaga terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan akan terkontaminasi oleh pihak penguasa.

Akhirnya, mungkinkah mental penguasa dan pejuang demokrasi dapat seiring bersama untuk membangun bersama Republik ini? Dapatkah kita bekerja sama tanpa harus ada yang: berkorban dan dikorbankan, mencurangi dan dicurangi, merekayasa dan direkayasa, serta menginstruksi dan diinstruksi? Masihkah nilai-nilai nasionalisme seperti 50 tahun yang lalu pernah dipakai untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mudah-mudahan diusia menginjak 50 tahun Indonesia merdeka, kita (Penguasa dan pejuang) semakin kritis dan tajam dalam mengisi pembangunan di segala bidang. Semoga!!

Sukadian
Mahasiswa Jurusan PTM, FPTK IKIP Surabaya

Pater Dick...

...dari halaman 11

A: Peran pers dalam kebudayaan, sejauh mana kebudayaan yang dibawa oleh pers mempengaruhi budaya pada satu masyarakat?

DH : Nah. Pers itu mau menyediakan apa yang disukai oleh pembaca atau mau menghidangkan apa yang seharusnya diketahui oleh pembaca. Misalnya pers di Yogyakarta khususnya KR (Kedaulatan Rakyat - red) itu menghidangkan apa yang disukai pembaca, sedangkan Bernas saya kira juga berani untuk menghidangkan yang perlu diketahui oleh kita yang kadang-kadang sampai tidak berani dimuat oleh Kompas...dus perlunya kesadaran redaksi yaitu apa yang menjadi barometernya, apa yang disukai pembaca khususnya daerah atau juga khususnya tingkat pusat.

A: Kalau tentang peningkatan budaya , untuk peningkatan kebudayaan di masyarakat misalnya lewat pers, bagaimana pendapat romo?

DH: KR minggu pagi ada cerita-cerita mengenai peristiwa budaya dan ini juga menyangkut misalnya sejarah. Jadi di jaman ini khususnya angkatan muda misalnya mereka yang tidak tahu sejarah, pernah ada sekolah Pakem (sebuah sekolah di Yogyakarta - red) kunjungan ke Jatim, saya tanya apakah mampir ke Trowulan....Trowulan apa itu? Nah cukup memprihatinkan pengetahuan mereka tentang kebudayaan bahwa mereka tidak tahu bagaimana Trowulan pernah menjadi ibukota Majapahit. Mereka tidak tahu.

A: Tentang sejarah tadi adakah pers membantu generasi sekarang melihat sejarah?

DH : Sedikit.

A : Mungkin pater bisa bercerita tentang sejarah pers Indonesia ?

DH : Sekarang memang ada karangan-karangan dan tokoh yang turut membikin sejarah dan ini baik, saya kira orang kalau mau berperang kena peluru kehilangan jarinya ditulis.......itu bukan sejarah. Ya kadang-kadang kita punya pengetahuan lebih besar justru lewat reportase televisi dari luar negri misalnya reportase yang mewawancarai Goenawan Mohamad oleh reporter dari negri Belanda dan apa yang mereka ungkapkan disini tidak banyak orang tahu.

A : Jadi hal semacam itu jika ditarik ke Indonesia pasti akan dilarang.

DH : Ya jelas....orang akan ragu-ragu. Waktu itu pas di negeri Belanda ada wawancara dengan Bung Hatta tahun 1970, ditanyai (dalam wawancara) pokoknya peran ABRI dalam negara dominan tidak ada batasnya dan seharusnya tidak begitu dan ini sangat relevan.

(BP, DK)

Syalom

Untukmu
Proklamator Bung Karno & Bung Hatta serta Para pahlawan kemerdekaan
Terimakasih untuk
Indonesia Emas
yang kini kami nikmati
Restumu menyemangati kami untuk meneruskan perjuanganmu membebaskan rakyat dari pembodohan, pemiskinan, dan segala bentuk penindasan

Sapa

Hallo Amigo, Merdeka!

Untuk menghantar terbitan **Indonesia Emas** kali ini perlu kiranya Amigoz mengucapkan terimakasih atas bantuan dan perhatian dari amigo-amigo(baik yang berupa tulisan, kritik, saran, maupun apa saja terutama untuk CRI ALOCITA terimakasih atas pinjaman lab. komputernya). Sebagai bahan renungan awal dalam menyambut 50 tahun kemerdekaan, Amigoz terbit dengan menghantarkan tema besar Refleksi Pers Indonesia menjelang 50 Tahun Kemerdekaan. Amigoz sangat terbuka atas segala macam bentuk kritik yang membangun, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Tak lupa ucapan selamat datang untuk amigo-amigo'95, ayo gabung dengan Amigoz. Akhirnya Amigoz akan tetap berkarya dalam cinta dan persaudaraan. Ad Maiorem Dei Gloriam, Adios Amigo..........